

**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN  
DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA  
(TINJAUAN FIQIH SIYASAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum Islam (SH.I) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

**ROBIN DARMENDRA**

**NIM. 10624003800**

**PROGRAM STUDI (S1)  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara tinjauan Fiqih Siyasah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksudnya adalah transparansi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Latar belakang pemilihan judul ini adalah karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan desa sungai tonang dan bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa Sungai Tonang, serta tinjauan menurut Fiqih Siyasah.

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. Sampel dalam penelitian adalah kepala desa, ketua BPD dan 41 kepala keluarga dengan menggunakan teknik Random sampling (acak). Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara, angket dan tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang disajikan secara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian diketahui pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Sungai Tonang secara umum sudah cukup baik dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerjasama antara aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur. Dari aspek transparansi dalam penyaluran berbagai bantuan untuk masyarakat desa kurang baik.

Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan desa sungai tonang dilihat dari aspek keaktifan anggota, peran pengawasan pemerintahan desa, keikutsertaan dalam pembahasan pembangunan desa. Hanya dalam pengawasan penggunaan APBDes kurang baik terutama dalam hal penyaluran bantuan oleh pemerintah desa.

Pelaksanaan pemerintahan pada Desa Sungai Tonang belum berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. Hal ini terlihat dari penyaluran bantuan dari pemerintah pusat belum disalurkan dengan secara transparan kepada masyarakat.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NOTA PEMBIMBING**

**PERSEMBAHAN**

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

A. Geografis dan Demografis.....	13
B. Agama dan Pendidikan.....	16
C. Pemerintahan .....	18
D. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat.....	20
E. Transportasi dan Komunikasi.....	22

### **BAB III TINJAUAN TEORI TENTANG OTONOMI DAERAH**

A. Pengertian Otonomi Daerah.....	23
B. Pelaksanaan Otonomi daerah.....	26
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	29
D. Pemerintahan Desa.....	33
E. Penjelasan Fiqih Siyash.....	36

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang .....	42
B. Pengawasan BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang.....	48
C. Tinjauan Fiqih Siyasah.....	54

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik indonesia.<sup>1</sup>

Hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Hak
  - a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
  - b. Memilih pimpinan daerah
  - c. Mengelola aparatur daerah
  - d. Mengelola kekayaan daerah
  - e. Memungut pajak dan retribusi daerah
  - f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
  - g. Mendapatkan hak lainnya yang di atur dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 167.

## 2. Kewajiban

- a. Melindungi masyarakat
- b. Meningkatkan kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- f. Melestarikan nilai sosial budaya.<sup>2</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang bersifat lokalitas. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis daerah yang terdiri dari tiga kelompok yaitu pendelegasian kewenangan politik, urusan daerah dan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi merupakan suatu pekerjaan yang kompleks dan berkesinambungan karena setelah melalui tahap awal desentralisasi yang dilakukan melalui pelimpahan berbagai jenis kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian akan dilanjutkan dengan pelimpahan pembiayaan, dokumen-dokumen (kearsipan), sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Tujuan desentralisasi adalah untuk demokratisasi, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-2, h. 40.

Pemerintahan Desa, mempunyai kewenangan dan kekuasaan sendiri dalam pengaturan serta mengurus wilayahnya dan ditentukan oleh kebijakan seorang Kepala Desa dengan pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan hanya melaporkan seluruh kegiatan kepada pemerintahan kecamatan. Sebagai contoh dalam hal memilih dan mengangkat seorang Kepala Desa.<sup>4</sup>

Pelaksanaan hak dan wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan desa diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman umum kewenangan desa. Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa, pencalonan ,pemilihan dan penetapan Kepala Desa, pemilihan dan pengangkatan penetapan perangkat desa, pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pencalonan pemilihan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemberdayaan dan Pelestarian Lembaga Adat, penetapan Peraturan Desa, penetapan kerja sama

---

<sup>4</sup> Rosman Ramli, (Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara), *wawancara*, tanggal 23 februari 2010.

antar desa dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>5</sup>

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangan Kepala Desa mempunyai kewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

---

<sup>5</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-4, h. 56.



6. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
7. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
8. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
9. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
10. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestrikan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Pemerintahan Desa Sungai Tonang dalam pelaksanaan otonomi desa kurang demokratis dan transparan dalam menjalankan pemerintahan khususnya penyaluran bantuan dari Pemerintah Pusat seperti bantuan *kerambah*, banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut<sup>7</sup>. Kepala Desa tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang bantuan itu. Kepala Desa hanya memberikan bantuan tersebut kepada orang terdekatnya. Sebenarnya bantuan itu lebih diutamakan untuk masyarakat yang tidak mampu. Hal seperti ini juga disebabkan kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya mengontrol pemberian bantuan tersebut.

Dalam kasus lain aparat pemerintah Desa Sungai Tonang juga tidak pernah menjelaskan permasalahan dana retribusi galian batu sehingga terjadi konflik antara masyarakat (pemuda) dengan aparat pemerintah desa yang belum terselesaikan dengan baik mengenai ketidak jelasnya pengelolaan

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

<sup>7</sup> Husin, (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, tanggal 8 April 2010.

dan penerapan terhadap hasil kekayaan daerah tersebut di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara.<sup>8</sup>

Di saat itulah seharusnya aparaturnya pemerintahan desa mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerahnya dengan arif, kekeluargaan, hal ini sebagai pertanggung jawaban terhadap pembangunan dan kemajuan desa dengan membina kehidupan masyarakat.

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan negara yang mempunyai kekuasaan umum berada di tingkat yang paling bawah. Dan merupakan miniatur pemerintahan negara, hanya saja kedudukannya menyerupai qadhi kalau dilihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi pandangan umum. Namun dari pandangan kerjanya, pemerintahan desa lebih khusus, karena kekuasaan terbatas pada bagian atau daerah kecil. Dilihat dari kepentingannya, kekuasaan ini dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengangkatan resmi, yaitu adanya penunjukan langsung oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintahan Daerah) dan tidak mempunyai hak istimewa yang tercerminkan dalam kebebasan serta tidak mempunyai hak prerogatif tertentu dalam pengurusan daerahnya. Kepala Daerah berfungsi sebagai Imam dalam kekuasaannya.<sup>9</sup>

Dalam fiqh siyasah, sebagai mana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena hal ini terkait dengan pribadi

---

<sup>8</sup> Yeni Rahman, (Ketua Pemuda), *wawancara*, tanggal 9 April 2010.

<sup>9</sup> Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 57.

Muhammad SAW sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara.<sup>10</sup>

Melihat hal itu, Ulama fiqh telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqh Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqh dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.<sup>11</sup>

Dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian **”Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Fiqih Siyasah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang?
2. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Sungai Tonang ?

---

<sup>10</sup> Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 178.

<sup>11</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam* ( Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayaind Dinnyyah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 67.

3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Sungai Tonang ?

### **C. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampat Utara dan bagaimana pengawasan BPD terhadap pelaksanaan otonomi desa dan hal ini ditinjau menurut Fiqih Siyasah.

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Sungai Tonang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa Sungai Tonang.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Desa Sungai Tonang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti di samping untuk melengkapi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah dalam praktek yang terjadi di lapangan.
2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan Bagi aparaturnya Pemerintahan Desa Sungai Tonang dalam menjalankan roda pemerintahan serta dilihat dari aspek fiqh siyasah
3. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang juga berminat untuk meneliti dalam bidang yang sama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi**

Tempat atau Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara. Letaknya tidak jauh dari pusat kota Bangkinang lebih kurang 5 KM. Dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat seperti sepeda motor atau mobil. Ada pun alasan penulis meneliti pada Desa Sungai Tonang adalah karena masalah tersebut belum pernah diteliti di tempat yang bersangkutan dan data-data dapat dikumpulkan dari sumber atau informan yang ada dan dapat dijumpai baik untuk wawancara maupun angket serta lokasinya terjangkau serta peneliti sudah mengenalnya dengan baik.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Aparatur Desa beserta masyarakat di Desa Sungai Tonang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara menurut tinjauan Fiqih siyasah.

## 3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat pemerintahan desa dan masyarakat Desa Sungai Tonang yang terdiri dari 410 Kepala Keluarga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling dimana dari perangkat pemerintahan desa yang menjadi sampel adalah Kepala Desa dan Ketua BPD. Sedangkan dari masyarakat diambil sampel sebanyak 10 % atau sebanyak 41 kepala keluarga dengan teknik *random sampling*.

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari *kay informan* atau informan kunci yaitu terdiri dari masyarakat dan aparatur pemerintahan Desa Sungai Tonang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari literatur dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu peneliti turun langsung kelapangan untuk meninjau secara dekat permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai subjek penelitian.
- c. Angket, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan berupa daftar kuesioner yang harus diisi oleh responden.
- d. Dokumentasi, yaitu data-data berupa dokumen yang diperoleh dari Desa Sungai Tonang.
- e. Library Research (studi pustaka), yaitu menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Analisa Data

Data yang sudah terkumpul dianalisa dengan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Deduktif, yaitu dengan meneliti hal-hal yang bersifat umum, di analisa, kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan meneliti hal-hal yang terperinci yang bersifat khusus, di analisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian dari data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan

teori-teori yang mendukung pembahasan serta digambarkan dalam bentuk tulisan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam mengemukakan dan menguraikan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II** : Bab ini akan dijelaskan tentang Letak Geografis, Pemerintahan, Agama, Ekonomi dan Sosial, Pendidikan, Transportasi dan Komunikasi.

**BAB III** : Pada bab ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang Pengertian Otonomi Daerah, Pelaksanaan Otonomi Daerah, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa dan Tinjauan Umum Fiqih Siyasah.

**BAB IV** : Merupakan bab inti yang berisikan tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang, Pengawasan Badan Perwakilan Desa (BPD) Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Desa Sungai Tonang, dan Tinjauan Fiqih Siyasah.

**BAB V** : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

#### **A. Geografis Dan Demografis**

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar merupakan salah satu desa yang memiliki letak yang tidak jauh dari ibukota kecamatan. Letak dari Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Kampar.

Tahun 2002 Desa Sungai Tonang memisahkan diri dari Desa Muarajalai Kabupaten Kampar, yang sekarang sudah menjadi kawasan Kecamatan Kampar Utara.<sup>1</sup>

Adapun batas-batas wilayah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut;

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Sembilan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Belah
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Muara Jalai
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Lawas<sup>2</sup>

Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara dihuni oleh berbagai suku pendatang seperti: Jawa, Minang, Melayu dan suku kecil lainnya. Penduduk Desa sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara berjumlah 2073 jiwa. Dari 2073 jiwa tersebut 1024 jiwa kaum laki-laki dan 1049 jiwa kaum

---

<sup>1</sup> Rusman Ramli, (Kepala Desa Sungai Tonang), tanggal 03 Maret 2010.

<sup>2</sup> Sumber Data dari Kantor Kepala Desa Sungai Tonang.

perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara dapat dilihat pada table berikut:

**TABEL II.1**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	1024 Jiwa
2	Perempuan	1049 Jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>2073 Jiwa</b>

Sumber data : Kantor Kepala Desa Sungai Tonang

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih beberapa saja. Laki-laki yang berjumlah 1024 sedangkan perempuan berjumlah 1049 jiwa.

Kemudian kalau dilihat pula keadaan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.

**TABEL II.2**  
**KLASIFIKAI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR**

No	Kelompok Umur	Jumlah	Porsentase
<b>1</b>	Umur 0 – 4 Tahun	214	10,32
<b>2</b>	Umur 6 – 12 tahun	223	10,75
<b>3</b>	Umur 13 – 16 Tahun	227	10,95
<b>4</b>	Umur 17 – 19 Tahun	214	10,32
<b>5</b>	Umur 20 – 25 Tahun	281	13,55
<b>6</b>	Umur 26 – 39 Tahun	354	17,07
<b>7</b>	Umur 40 – 55 Tahun	400	19,29
<b>8</b>	Umur 56 Tahun keatas	161	7.76
	<b>Jumlah</b>	<b>2073</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sungai Tonang

Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara yang berumur 4 tahun sebanyak 214 jiwa, yang berumur 6 sampai 12 tahun berjumlah 223 jiwa, yang berumur 13 sampai 16 tahun berjumlah 227 jiwa, yang berumur 17 sampai 19 tahun berjumlah 214 jiwa, yang berumur 20 sampai 25 tahun berjumlah 281 jiwa, yang berumur 26 sampai 39 tahun berjumlah 354 jiwa, yang berumur 40 sampai 55 tahun berjumlah 400 jiwa dan yang berumur diatas 56 tahun berjumlah 161 jiwa. Dari jumlah keseluruhan yang paling banyak adalah yang berumur antara 40 -55 tahun.

## B. Agama dan Pendidikan

Masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar keseluruhannya menganut agama Islam, tanpa ada masyarakat yang menganut agama diluar Agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup mereka. Mereka menjadikan Agama Islam sebagai nilai yang paling tinggi.

Jika dilihat dari segi sarana ibadah yang menjadi pusat pembinaan kehidupan beragama umat Islam di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara dapat dikatakan cukup memadai.

Selanjutnya penulis sajikan sarana ibadah yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. Adapun sarana ibadah yang ada terlihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL II. 3**  
**JUMLAH SARANA IBADAH**

NO	Nama Dusun	Masjid	Mushalla	Gereja
1	Dusun I Sungai Tonang	1	2	-
2	Dusun II Sungai Tonang	1	2	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	-

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sungai Tonang.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara terdapat 2 (dua) buah Masjid dan 4 (empat) buah Mushalla. Dari kedua masjid tersebut masing-masing terletak di Dusun I Sungai Tonang dan Dusun II Sungai Tonang. Sedangkan untuk Mushallah

yang berjumlah 4(empat) buah yang terdapat di Desa Sungai Tonang, masing-masing mushallah terdapat di Dusun I Sungai Tonang berjumlah 2(dua) buah musholla dan di Dusun II Sungai Tonang sebanyak 2(dua) buah mushollah. Sedangkan untuk gereja tidak ada sama sekali. Adapun jumlah keseluruhan sarana ibadah yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara berjumlah 6 buah.

Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara berjarak lebih kurang 7 kilometer dari ibu kota kabupaten. Namun perkembangan dalam bidang pendidikan tergolong pesat, walaupun tidak sepesat yang ada di kota, hal ini terlihat pada tabel berikut:

**TABELI II. 4**  
**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	SD	2
3	MTS	1
4	MA	1
5	MDA	1
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sungai Tonang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan sudah terpenuhi untuk setiap tingkatan sekolah. Misalnya di Desa Sungai Tonang

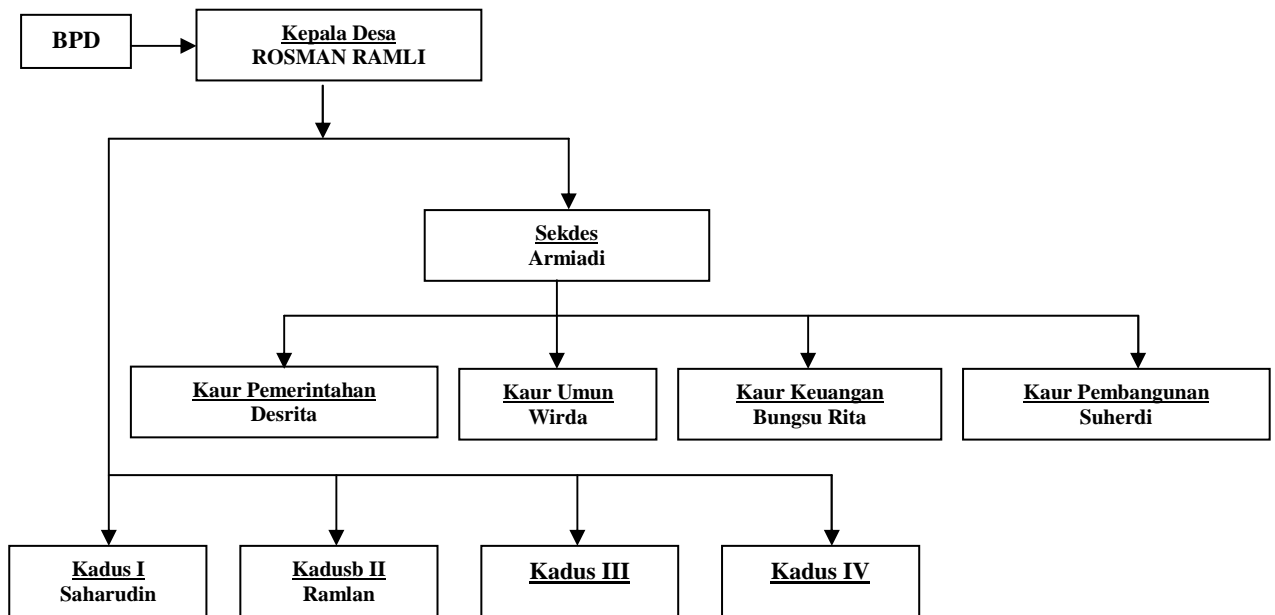
Kecamatan Kampar Utara sudah terdapat 6 (enam) sarana pendidikan yaitu tingkat TK, SD, MTS, MA dan MDA.

### **C. Pemerintahan**

Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, Pemerintah Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang ditunjuk melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) langsung dengan sistem demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari desa dan memahami tentang pemerintahan desa.

Pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, seorang Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes), dan beberapa orang Kepala Urusan (Kaur). Kepala Desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan dilakukan pengawasan oleh legislatif desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Tonang



Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sungai Tonang

Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kepala desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada camat.
2. Sekretaris Desa merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas dalam membantu kerja kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa.
3. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan administrasi bidang pemerintahan.

4. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan pembangunan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tinggi desa yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan melakukan kerja sama dengan kepala desa dalam urusan pembangunan desa.
6. Kepala Dusun (Kadus) merupakan wakil dari kepala desa pada setiap dusun yang ada. Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing-masing.

#### **D. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat**

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah menjadi petani. Jenis usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah jenis usaha tani karet dan kelapa sawit, karena topografi tanah sangat mendukung usaha tani karet dan kelapa sawit tersebut. Disamping melakukan usaha tani karet dan kelapa sawit, ada sebahagian masyarakat yang melakukan usaha sampingan yakni melakukan usaha perdagangan, peternakan dan usaha pengolahan kayu.

Potensi pengembangan ekonomi Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah pengembangan usaha perkebunan



kelapa sawit dan perkebunan karet. Selain dari itu Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga memiliki usaha tani sayur-sayuran karena tanahnya sangat subur. Selain dari pengembangan usaha tani, di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga cocok dikembangkan sektor peternakan, karena didukung oleh padang rumput yang luas.

Masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menganut sistem social dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial dalam masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga melakukan upacara syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa.

Adat yang digunakan bukanlah sebagai landasan kontrol social yang utama melainkan konsep Agama Islam sebagai pedoman utama mereka, sehingga dikenal dengan istilah adat bersendikan sara', sara' bersendikan Kitabullah. Adapun pemuka adat yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berjumlah lima orang yang diangkat sebagai penghulu dari suku-suku yang ada dan diangkat oleh

kemenakan mereka dengan sistem pemilihan kepada kemenakan yang memahami adat secara baik dan benar.

#### **E. Sarana Transportasi Dan Komunikasi**

Sarana transportasi yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar kebanyakan masyarakat menggunakan transportasi darat. Keadaan jalan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar jalannya sudah di aspal sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Sarana transportasi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga menggunakan sarana transportasi angkutan umum yakni becak/kendaraan roda tiga yang beroperasi setiap harinya. Dalam keseharian sarana transportasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan juga dapat dipakai untuk mengangkut barang dagangan.

Sarana komunikasi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat juga bisa menerima berbagai informasi dan berita-berita melalui sarana televisi dengan memanfaatkan receiver atau parabola.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH**

##### **A. Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersipat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Dengan pelimpahan kewenangan ini dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bukan berarti berjalan dengan mulus. Pelaksanaan otonomi daerah tidak semudah membalik telapak tangan, diperlukan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan kewenangan tersebut dengan baik dan benar. Tujuan desentralisasi adalah

---

<sup>1</sup>. Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 40-41.

untuk demokratisasi, efektivitas dan efisiensi serta keadilan. Apabila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan timbul dan muncul sumber-sumber keresahan dan krisis di tengah-tengah masyarakat.

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebewind* atau asas pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya. Adapun prinsip otonomi daerah antara lain:

#### 1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadai urusan rumah tangga

---

<sup>2</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21-22.

daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

## 2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Kewenangan pemerintah pusat di daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh dinas provinsi sebagai perangkat provinsi. Penyelenggaraan dekonsentrasi itu dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan

---

<sup>3</sup>. C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia; Hukum Adminitarasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2004), Cet. ke-2, h. 3-4.

secara terpisah dari APBD. Gubernur memberitahukan kepada DPRD tentang kegiatan dekonsentrasi.<sup>4</sup>

### 3. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>5</sup> Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan itu dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBN. Pemerintah daerah memberitahukan rencana tugas pembantuan kepada DPRD dan pemerintah desa memberitahukannya kepada Badan Perwakilan Desa.<sup>6</sup>

## B. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kata pemerintah, pemerintahan, pemerintahan daerah, pemerintahan jelas dibedakan artinya satu sama lainnya. Dalam

---

<sup>4</sup>. HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, *op.cit.*, h.168-169.

<sup>5</sup>. C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *loc.cit.*

<sup>6</sup>. HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, *loc.cit.*

ketentuan umum di rumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintah pusat, yaitu presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah. Sementara itu, kata pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 ini tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Di samping itu, daerah diberikan keleluasan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddigie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007), h. 411.

memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.<sup>8</sup>

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan keajahteraan rakyat.

Betapa luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin adanya hubungan antara masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD. Kinerja penyelenggara otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD, harus selalu berorientasi pada peningkatan dan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas.

---

<sup>8</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet.ke- 2, h. 5.



### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah**

#### **a. Faktor Manusia Pelaksana**

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan pertama-tama dan terutama ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subyek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualifikasi mentalitas dan kapaistas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Manusia pelaksana pemerintahan daerah dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok, masing-masing:

1. Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
2. Alat-alat perlengkapan daerah yakni aparatur dan pegawai daerah.
3. Rakyat daerah, yakni sebagai komponen environmental (lingkungan) yang merupakan sumber energi terpenting bagi daerah sebagai organisasi yang bersistim terbuka.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 277.

Peranan kepala daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Berhasil atau tidaknya seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung pada kualitas yang dimilikinya. Tugas Kepala Daerah sebagai alat daerah adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan daerah.
2. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
3. Bersama-sama dengan DPRD membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan daerah<sup>11</sup>.

Tugas pokok DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan daerah. Kebijaksanaan itu diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah. Selain itu DPRD berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Untuk menjalankan dua fungsi tersebut DPRD mempunyai kewenangan tertentu atau hak-hak untuk melakukan tindakan tertentu agar tugas/fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan fungsi pertama yaitu menetapkan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPRD mempunyai hak prakarsa, hak anggran, dan hak amandemen (hak mengadakan perubahan). Sedangkan untuk fungsi kedua yaitu menjalankan pengawasan, DPRD memiliki hak mengajukan pertanyaan bagi masing-

---

<sup>11</sup>.*Ibid.*

masing anggota, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

b. Faktor Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan. Yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada umumnya sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a). Hasil pajak daerah
- b). Hasil retribusi daerah
- c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah
- d). Lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah.

2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah pusat.

c. Faktor Organisasi Dan Manajemen

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor organisasi dan manajemen. Agar pelaksanaan otonomi Daerah dapat berjalan dengan baik, dalam arti Daerah dapat/mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan organisasi dan manajemen yang baik pula. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut dapat diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi. Atau dengan perkataan lain, organisasi yang sehat, efektif dan efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari pada asas-asas berikut:

- a). Rumusan tujuan
- b). Pembagian pekerjaan
- c) Pelimpahan/pendelegasian wewenang
- d). Koordinasi
- e). Rentangan control
- d). Kesatuan komando

Faktor penting lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi Daerah adalah faktor manajemen. Dalam pengertian umum manajemen adalah suatu *seni, keterampilan, atau keahlian*, yakni “seni dalam

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain” atau “keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan”.

Dari pengertian di atas, maka manajemen berkaitan erat dengan kemampuan dan keterampilan seorang pemimpin dalam menggerakkan dan mendayagunakan orang-orang dan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga dapat dilihat sebagai ilmu pengetahuan

yaki, “ ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan mengajarkan tentang sistem kerja sama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan”<sup>1</sup>.

#### d. Pemerintahan Desa

Desa berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik indon<sup>2</sup>.

Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta keputusan kepala desa. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan

---

<sup>1</sup> *Ibid*, h. 256.

<sup>2</sup> Ateng Syafrudin, *Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Cipta Media, 2006), h. 47-48.

untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga, dan melakukan pinjaman desa.

Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibebani wewenang dan kewajiban:

1. Kepala Desa Mempunyai Wewenang

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kegidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengoordinasikan pembanguna Desa secara partisipatif
- h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
2. Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah Desa
  - g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
  - l. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- m. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dan mengimpormasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang tata cara dan prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawabannya.

#### e. Tinjauan Fiqih Siyasah

Dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah*, *imam*, atau *amir*. Dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu Kepala Negara, pemimpin tertinggi umat Islam, pengganti Nabi dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian *khalifah*, *imam*, atau *amir*, tidaklah identik dengan

---

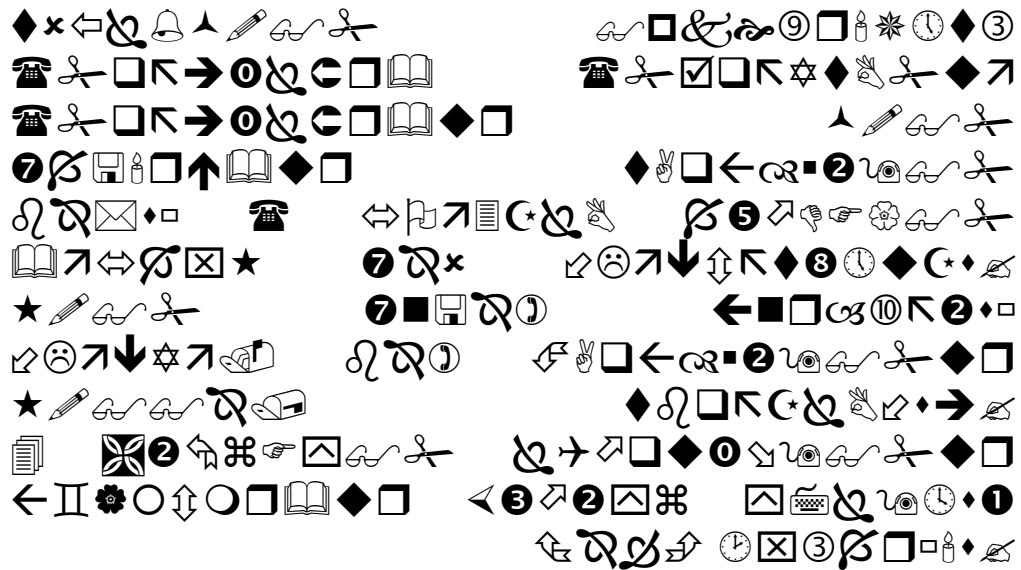
<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> J. Suyuthi Pulungan, "*Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*", ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999 ), Cet. 4., h. 48 – 49.



Presiden, Bupati atau Walikota. Karena *khalifah*, *imam*, dan *amir* pada zaman *Khulafaur Rasyidin* selain mereka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.<sup>6</sup>

Dalam surat *an-Nisa'* ayat 59 Allah SWT berfirman:



Artinya: “ *Hai orang - orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul*

( *Nya* ), dan *ulil amri* di antara kamu... ”<sup>7</sup> (Q.S. *an-Nisa'*:59).

Menurut *Ibn Taimiyah* sebagaimana yang dikutip oleh *Farid Abdul Khaliq*, mendefinisikan *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Senada dengan itu, *Syaikh Mahmud Shaltut* berkata: *Ulil amri* adalah para ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2007), Cet. ke-2, h. 69.

spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu.<sup>8</sup>

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Selama imam atau pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah swt. maka pemimpin tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan keadilannya, melaksanakan hukum dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya serta berkonsekuensi terhadap hukum tersebut dan pelaksanaannya. apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak bagi rakyat untuk tidak taat atau patuh terhadap pemimpin.<sup>9</sup>

Menurut *Al - Mawardi* sebagaimana yang dikutip oleh *M.Dhiauddin Rais*, berpendapat apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya berarti imam telah memenuhi hak Allah swt. berkenaan dengan hak kewajiban rakyat. Pada saat itu dia memiliki dua hak yang harus dipenuhi rakyatnya yaitu ketaatan dan bantuan selama keadaanya tidak berubah.<sup>10</sup>

Pemimpin yang baik dan sukses adalah pemimpin yang dapat dicintai oleh masyarakat (bawahan) nya<sup>11</sup>. Pemimpin sering disebut *khadimul ummah* (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posissi sebagai pelayan masyarakat. Bagi pemimpin yang bersikap melayani, maka kekuasaan yang dipimpinnya bukan sekedar

---

<sup>8</sup> Farid Abdul Khaliq, "*Fiqh Politik Islam*", (Jakarta: Amzah, 2005), h. 83.

<sup>9</sup> Abul A'la al-Maududi, "*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*", (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-4, h. 247 - 248.

<sup>10</sup> M. Dhiauddin Rais, "*Teori Politik Islam*", (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), Cet. 2., h. 276.

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah; dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 120.

kekuasaan yang bersifat formalistik karena jabatannya, melainkan sebuah kekuasaan yang melahirkan sebuah *power* (kekuatan) yang lahir dari kesadaran.<sup>12</sup>

Banyak pemimpin Islam yang dapat dijadikan contoh untuk diterapkan dalam kepemimpinan zaman sekarang. Walaupun mereka hidup dengan permasalahan yang tidak sama rumitnya dengan permasalahan yang dihadapi di zaman sekarang, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin pada zaman pemerintahan Islam (*Khulafaur Rasyidin*) bahkan lebih kompleks lagi. Di antara pemimpin Islam yang pernah membuat kejayaan pada masanya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya.

Banyak di antara pemimpin Islam baik di zaman Khulafaur Rasyidin dan beberapa pemimpin pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah telah memberikan contoh dan suri teladan. Sifat kepribadian yang bersahaja, wara', istiqomah dan sangat agamis. Situasi dan kondisi saat pemerintahan mereka sangat mempengaruhi kepemimpinannya.

Tindakan pemberontakan terhadap imam atau pemimpin yang sah dan tanpa adanya alasan dapat dikategorikan sebagai tindakan *bughat* dan bagi pemberontak wajib diperangi. Akan tetapi apabila imam atau pemimpin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan, maka ia wajib untuk diturunkan. *Asy - Syarastani* sebagaimana yang dikutip oleh *M.*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

**Dhiauddin** mengatakan tingkah laku seorang juga dapat dijadikan sebagai dalil dalam memenuhi persyaratan atau sebagai saksi dan hakim pengadilan, maka tingkah lakupun dapat dijadikan dalil dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam keimamahan. Jika kemudian setelah diangkat terlihat adanya kebodohan, kesewenang-wenangan, kesesatan atau kekafiran dengan sendirinya di terlepas dari jabatannya atau kita sendiri akan melepasnya.<sup>13</sup> Dengan demikian, pemimpin atau khalifah bukanlah pemimpin mutlak, namun dia terikat dengan syariat Islam, yakni konstitusi Islam.<sup>14</sup>

Pemimpin merupakan *agen primer* untuk menentukan kelompok organisasi yang dibina, juga memberikan motivasi kerja menentukan sasaran yang hendak dicapai. Ringkasnya pemimpin merupakan *inisiator, motivator, stimulator, dinamisator* dan *innovator* dalam struktur organisasinya. Kepemimpinan merupakan kekuatan semangat dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggotanya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Seorang pemimpin dengan kepemimpinannya harus memiliki idealisme yang kuat serta ia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara sejelas-jelasnya, mungkin karena dia harus mampu menentukan suatu tujuan tersebut dengan menghilangkan segala hambatan. Masyarakat merupakan tulang punggung pembangunan. Rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya negara selain pemerintah, wilayah, kedaulatan

---

<sup>13</sup> M. Dhiauddin Rais, *op.cit.*, h. 279.

<sup>14</sup> Farid Abdul Khaliq, *op. cit.*, h. 30.

dan pengakuan dari negara lain. Tanpa adanya masyarakat atau rakyat sangatlah tidak mungkin pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Walaupun demikian rakyat tidaklah dapat berjalan sendiri tanpa adanya pemerintah, masyarakat akan selalu membutuhkan pemerintah. Pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara, karena tugas penting yang diemban oleh pemerintah itu adalah menjamin tegaknya sebuah negara yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat atau rakyatnya. Pemerintah dengan rakyat apabila hendak mencapai tujuan bersama harus saling kooperatif. Suatu negara akan menjadi makmur (*gemah ripah jenawi, toto tentrem, kerto raharjo*)<sup>15</sup> atau *baldatun toyyibun wa robbun ghafur* tergantung dengan kebijaksanaan/policy dari pemerintah yang nota benenya adalah pemimpin.

Jadi, tujuan pokok dari adanya seorang pemimpin dan peraturan atau Undang-undang adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan di dunia lebih lagi kehidupan akhirat. Dengan demikian, kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, karena pemimpin dapat dijadikan contoh yang terbaik bagi masyarakat.

---

<sup>15</sup> *Gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kerto raharjo*, berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti makmur dan banyak penduduknya, tentram dan makmur, masyarakat yang adil dan menjadi dambaan kita, tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Edisi 3., h.349.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang**

Desa Sungai Tonang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kampar Utara di bawah kekuasaan Pemerintahan Kabupaten Kampar. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintahan desa melaksanakan dan menjalankan kebijakan serta keputusan dari pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah desa juga bekerjasama dengan beberapa pihak seperti lembaga permusyawaratan desa (BPD), dengan para tokoh masyarakat dan juga dengan masyarakat luas. Dalam periode sebulan sekali mereka mengadakan pertemuan untuk membahas tentang rencana pembangunan desa. Pertemuan ini sering dilakukan di rumah kepala desa atau salah seorang dari perangkat desa. Pertemuan ini memang jarang dilakukan di kantor desa karena merasa kalau diadakan di rumah, suasana kekeluargaan terasa lebih kental dari pada mengadakan pertemuan di kantor desa karena hal tersebut terkesan lebih formal.

Setiap tindakan yang akan diambil oleh kepala desa akan selalu dimusyawarahkan melalui komunikasi internal terlebih dahulu sekurang-kurangnya dengan Ketua BPD. Begitu pula dengan kebijaksanaan yang akan diambil oleh BPD, selalu berkoordinasi dengan kepala desa.

Dalam hal penggunaan APBDes, aparaturnya desa selalu melakukan pencatatan tertulis. Setiap penerimaan ataupun pengeluaran kas desa selalu ditulis dalam buku kas masuk dan kas keluar. Pencatatan ini dilakukan oleh bendahara desa yang ditunjuk melalui kesepakatan semua warga desa sungai tonang.

Laporan tentang keuangan desa akan disampaikan kepada BPD setiap satu semester, namun setiap akhir bulan selalu dilaporkan kepada masyarakat melalui laporan pada papan pengumuman atau papan informasi yang terletak di kantor desa. Laporan tersebut disampaikan secara rinci tentang berapa penerimaan yang diterima desa sungai tonang dari berbagai sumber dan berapa pengeluaran dana untuk berbagai keperluan desa.

Dalam hal penerimaan bantuan desa, aparaturnya desa melakukan identifikasi terhadap bantuan yang diterima guna dapat menyalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diterima masyarakat seperti bantuan bibit karet untuk masyarakat petani.<sup>1</sup>

Selain itu tidak semua petani berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, karena diprioritaskan kepada petani yang mempunyai lahan yang sudah diolah. Seperti juga halnya bantuan kerambah, penerima bantuan ini lebih diprioritaskan kepada masyarakat petani yang sudah pernah melakukan usaha seperti ini sebelumnya karena diyakini mereka lebih berpengalaman dibandingkan yang belum pernah sehingga bantuan kerambah yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi warga.

---

<sup>1</sup> Rosman Ramli (Kepala Desa Sungai tonang), wawancara, tanggal 05 Juli 2010.



Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penjajakan tentang pelaksanaan otonomi daerah pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang melalui berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya mengenai penyelenggaraan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah tersebut. Hal ini penulis lakukan dengan penyebaran angket kepada 41 orang responden yang mewakili.

Adapun hasil-hasil angket tersebut dapat penulis kemukakan pada bagian berikut ini:

**Tabel IV.1**  
**Tanggapan Responden Tentang Komunikasi Internal Perangkat Desa**  
**Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	13	31,7 %
2	Cukup	18	43,9 %
3	Kurang	10	24,3 %
<b>J u m l a h</b>		<b>41</b>	<b>100 %</b>

Sumber data : Olahan Angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang tanggapan responden mengenai komunikasi internal perangkat desa dimana sebanyak 13 orang responden atau sebesar 31,7 % menyatakan “baik”, sebanyak 18 orang responden atau sebesar 43,9 % menyatakan cukup dan sebanyak 10 orang responden atau sebesar 24,3 % menyatakan masih kurang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal perangkat Desa Sungai Tonang cukup baik.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan administrasi otonomi desa pada Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, yang akan penulis sajikan pada table berikut ini.

**Tabel IV.2**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Administrasi Otonomi**  
**Desa Pada Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	13	31,7 %
2	Cukup	20	48,8 %
3	Kurang	8	19,5 %
<b>J u m l a h</b>		<b>41</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Olahan Angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang tanggapan responden mengenai pelaksanaan administrasi otonomi desa dimana sebanyak 13 orang responden atau sebesar 31,7 % menyatakan “baik”, sebanyak 20 orang responden atau sebesar 48,8 % menyatakan “cukup” dan sebanyak 8 orang responden atau sebesar 19,5 % menyatakan masih “kurang”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi otonomi Desa Sungai Tonang cukup baik.

Selanjutnya mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara sebagaimana yang dikemukakan pada tabel IV.3 berikut ini.

**Tabel IV. 3**  
**Tanggapan Responden Tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan**  
**Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	9	21,9 %
2	Cukup	17	41,5 %
3	Kurang	15	36,6 %
<b>J u m l a h</b>		<b>41</b>	<b>100 %</b>

Sumber data : Olahan Angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang tanggapan responden mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa dimana sebanyak 9 orang responden atau sebesar 21,9 % menyatakan “baik”, sebanyak 17 orang responden atau sebesar 41,5 % menyatakan “cukup” dan sebanyak 15 orang responden atau sebesar 36,6 % menyatakan masih “kurang”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa cukup baik.

Selanjutnya mengenai terjalinnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat di Desa Sungai Tonang. Hasil jawaban responden akan penulis sajikan pada tabel berikut.

**Tabel IV.4**  
**Tanggapan Responden Tentang Kerjasama Antara Pemerintah Desa Dengan**  
**Masyarakat di Desa Sungai Tonang**  
**Kecamatan kampar utara**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	14	34,1 %
2	Cukup	20	48,9 %
3	Kurang	7	17 %
<b>J u m l a h</b>		<b>41</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Olahan Angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang tanggapan responden mengenai kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat desa dimana sebanyak 14 orang responden atau sebesar 34,1 % menyatakan “baik”, sebanyak 20 orang responden atau sebesar 48,9 % menyatakan “cukup” dan sebanyak 17 orang responden atau sebesar 17% menyatakan masih “kurang”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat cukup baik

Selanjutnya mengenai tanggapan responden terhadap kemampuan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, yang akan penulis sajikan pada table berikut ini.

**Tabel IV.5**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam**  
**Menjalankan Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan**  
**Kampar Utara**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	16	39 %
2	Cukup	18	44 %
3	Kurang	7	17 %
<b>J u m l a h</b>		<b>41</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Olahan Angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa dimana sebanyak 16 orang responden atau sebesar 39 % menyatakan “baik”, sebanyak 18 orang responden atau sebesar 44 % menyatakan “cukup” dan sebanyak 7 orang responden atau sebesar 17% menyatakan masih “kurang”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa cukup baik

Selanjutnya tanggapan responden mengenai penyaluran bantuan untuk masyarakat yang diberikan melalui pemerintah Desa Sungai tonang. Hasil penelitian tersebut akan penulis sajikan dalam table berikut ini.

**Tabel IV. 6**  
**Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Bantuan Untuk**  
**Masyarakat Desa Sungai Tonang**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Baik	10	22,7 %
2	Cukup	13	31,7 %
3	Kurang	18	43,9 %
<b>J u l a h</b>		<b>41</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Olahan Angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang tanggapan responden mengenai penyaluran bantuan untuk masyarakat dimana sebanyak 10 orang responden atau sebesar 22,7 % menyatakan “baik”, sebanyak 13 orang responden atau sebesar 31,7 % menyatakan “cukup” dan sebanyak 18 orang responden atau sebesar 43,9 % menyatakan masih “kurang”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan untuk masyarakat Kurang baik

#### **B. Pengawasan BPD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Tonang yang juga merupakan badan legislatif dalam pemerintahan desa yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat desa yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk dapat mencapai peran tersebut lembaga ini perlu adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif desa (pemerintah desa) dengan BPD. Dengan demikian terdapat pemisahan kekuasaan serta dibatasi, sehingga eksekutif tidak lagi menjadi penguasa tunggal dalam pembuatan keputusan, akan tetapi hanya sebagai pelaksana kebijakan. Begitu juga halnya dengan lembaga BPD dimana lembaga ini tidak hanya dijadikan sebagai symbol pengawasan saja. Untuk itu lembaga ini juga perlu aktif sebagai lembaga legislative desa yang akan memantau pelaksanaan pemerintahan desa.

Hasil wawancara dengan ketua BPD sungai Tonang menyatakan bahwa selama ini lembaga BPD telah aktif melaksanakan perannya sebagai lembaga pengawas tersebut. Walaupun BPD Sungai Tonang tidak memiliki kantor secara formal, namun para anggota selalu aktif menjalankan tugas-tugasnya. Para anggota juga melakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan seperti program pembangunan desa

Untuk mencapai pembangunan yang baik dan sukses, antara BPD, Kepala Desa, dan masyarakat diperlukan kerjasama yang baik pula. Hal ini dapat diupayakan melalui musyawarah atau penyuluhan tentang pembangunan desa serta mengupayakan agar masyarakat peduli dan ambil bagian dalam pembangunan desa supaya menjadi desa yang maju dengan sumberdaya manusia yang bersemangat dalam menjalankan pembangunan Desa.

Masyarakat Desa Sungai Tonang yang mayoritas berprofesi sebagai petani, yang mana mereka lebih banyak meluangkan waktunya untuk memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lebih sedikit waktu yang terluang untuk memikirkan hal-hal lainnya seperti masalah pembangunan desa. Walaupun demikian BPD selaku lembaga yang pengayom masyarakat masih berupaya untuk melibatkan masyarakat dan berusaha mengajak mereka agar mau memperdulikan masalah pembangunan desa.

Salah satu faktor penentu dalam peningkatan pembangunan adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat. Untuk itu, para anggota BPD juga harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk mengetahui kondisi masyarakat dan memahami kontribusi mereka dalam pembangunan desa.

BPD Desa Sungai Tonang juga dapat melakukan perannya sebagai kontrol sosial atau peran pengawasan akan kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah desa, melalui kritikan dan saran yang bersifat konstruktif demi kemajuan pembangunan Desa Sungai Tonang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal senada juga disampaikan oleh ketua BPD melalui hasil wawancara, dimana lembaga BPD selalu memantau kegiatan pemerintahan desa. Setiap program desa yang dijalankan diawasi dengan baik oleh BPD dan melakukan analisa terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala desa, termasuk dalam hal penggunaan keuangan desa.

Dalam hal keuangan desa, BPD meminta bagian keuangan desa atau bendahara desa membuat laporan untuk setiap enam bulan mengenai penggunaan keuangan desa melalui laporan kas masuk dan kas keluar. Hasil laporan ini yang berupa laporan APBDes selanjutnya akan dianalisa. BPD juga melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kebenaran dan kewajaran laporan-laporan tersebut. Hal ini tentunya sangat diperlukan guna tercapainya transparansi penggunaan keuangan desa. Melihat keberadaan BPD yang juga merupakan lembaga perwakilan masyarakat dapat dijadikan sebagai wahana dalam melaksanakan demokrasi di Desa, bahkan kedudukan lembaga tersebut juga dapat disejajarkan dengan pemerintah desa dan dapat dijadikan sebagai mitra kerja. Dengan demikian beberapa program desa juga dapat melibatkan lembaga BPD. Dalam beberapa hal, pemerintah desa juga mengundang BPD beserta anggota untuk memusyawarahkan beberapa program pembangunan<sup>2</sup>.

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penjajakan melalui tanggapan masyarakat tentang peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan beberapa kuisisioner yang dibagikan. Hasil tanggapan responden mengenai kuisisioner tersebut dapat disajikan pada bagian berikut ini.

---

<sup>2</sup> Masrul, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sungai Tonang, *wawancara* 07 Juli 2010.



**Tabel IV. 7**  
**Tanggapan Responden Mengenai Keaktifan Anggota BPD Dalam Melaksanakan Tugasnya**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Setuju	10	22,7 %
2	Kurang Setuju	17	41,5 %
3	Tidak Setuju	14	34,1 %
<b>J u m l a h</b>		<b>41</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Olahan angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang tanggapan responden mengenai keaktifan anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya dimana sebanyak 10 orang responden atau sebesar 22,7 % menyatakan setuju sebanyak 17 orang responden atau sebesar 41,5 % menyatakan kurang setuju dan sebanyak 14 orang responden atau sebesar 34,1 % menyatakan masih kurang setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggota BPD cukup aktif dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya tanggapan responden mengenai kegiatan pemantauan BPD terhadap kegiatan aparatur desa sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Table IV. 8**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pemantauan Anggota BPD Terhadap Kegiatan Aparatur Desa**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Setuju	9	22 %
2	Kurang Setuju	17	41,5 %
3	Tidak Setuju	15	36,5 %
<b>J u m l a h</b>		<b>41</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Olahan Angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang tanggapan responden mengenai kegiatan pemantauan anggota BPD terhadap kegiatan aparatur desa dimana sebanyak 9 orang responden atau sebesar 22, % menyatakan setuju sebanyak 17 orang responden atau sebesar 41,5 % menyatakan kurang setuju dan sebanyak 15 orang responden atau sebesar 36,5 % menyatakan masih kurang setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggota BPD kurang dalam memantau kegiatan aparatur desa

Selanjutnya tanggapan responden mengenai pendapat yang menyatakan keikutsertaan anggota BPD dalam memenuhi undangan oleh aparatur desa dalam membahas berbagai kegiatan di Desa Sungai Tonang. Hasil penelitian ini akan penulis sajikan pada table berikut.

**Tabel IV. 9**  
**Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Anggota BPD Dalam**  
**Memenuhi Undangan Aparatur Desa Dalam Membahas Berbagai**  
**Kegiatan di Desa**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Setuju	9	22 %
2	Kurang Setuju	19	46,3 %
3	Tidak Setuju	13	31,7 %
<b>J u m l a h</b>		<b>41</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Olahan Angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang tanggapan responden mengenai keikutsertaan anggota BPD dalam memenuhi undangan aparatur desa dalam membahas berbagai kegiatan dimana sebanyak 9 orang responden atau sebesar 22 % menyatakan setuju sebanyak 19 orang responden atau sebesar 46,3 % menyatakan kurang setuju dan sebanyak 13

orang responden atau sebesar 31,7 % menyatakan masih kurang setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggota BPD kurang dalam memenuhi undangan aparaturnya Desa Sungai Tonang dalam membahas berbagai kegiatan di desa.

Selanjutnya tanggapan responden mengenai pendapat yang menyatakan bahwa anggota BPD selalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes, yang akan penulis sajikan pada table berikut ini.

**Table IV. 10**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pengawasan Anggota BPD Terhadap Penggunaan APBDes**

No	Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Setuju	8	19,51 %
2	Kurang Setuju	15	36,59 %
3	Tidak Setuju	18	43,90 %
<b>J u m l a h</b>		<b>41</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Olahan angket

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang tanggapan responden mengenai kegiatan pengawasan anggota BPD terhadap penggunaan APBDes dimana sebanyak 8 orang responden atau sebesar 19,5 % menyatakan setuju sebanyak 15 orang responden atau sebesar 36,59 % menyatakan kurang setuju dan sebanyak 18 orang responden atau sebesar 43,90 % menyatakan masih kurang setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggota BPD kurang melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes.

### **C. Tinjauan Fiqih Siyasah**

Desa Sungai Tonang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Utara yang ada di wilayah kerja Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kampar. Menurut pola kerja pemerintahannya ialah pemerintahan yang bersifat hirarki kekuasaan dari pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara dalam menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah tersebut.

Dalam Negara Islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Dalam Negara Islam Prinsip tersebut adalah prinsip tauhid, sunnatullah, dan persamaan sesama manusia. dan juga terdapat prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam<sup>3</sup>.

Masyarakat di Desa Sungai Tonang adalah masyarakat yang pada umumnya beragama Islam. Dalam Islam tidak diatur secara rinci bagaimana hidup dalam bernegara dan bermasyarakat. Pedoman dasar tersebut juga menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip Desa Sungai Tonang dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Selain itu, masyarakat Desa Sungai Tonang juga sangat memegang teguh prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan.

Sebenarnya dalam pemerintahan, sistem dan bentuk yang di pakai oleh suatu pemerintahan tidak menjadi hal yang utama, tetapi yang utama adalah bagaimana pelaksanaan dari sistem pemerintahan itu dan dapat memberikan

---

<sup>3</sup> Musda Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haykal*, (Jakarta: Paramadina , 2001), h. 2.

kemaslahatan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan lainnya.

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan Negara yang mempunyai kekuasaan umum berada ditingkat yang paling bawah. Dan merupakan miniatur pemerintahan Negara, hanya saja kedudukannya menyerupai kadhi kalau dilihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi pandangan umum. Namun dari pandangan kerjanya pemerintahan desa lebih khusus karena kekuasaannya terbatas pada bagian atau daerah kecil. Di lihat dari kepentingannya, kekuasaan ini dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengangkatan resmi yaitu adanya penunjukan langsung oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (pemerintahan daerah) dan tidak mempunyai hak istimewa yang tercerminkan dalam kebebasan serta tidak mempunyai hak prerogatif tertentu dalam penguurusan daerahnya. Kepala daerah berfungsi sebagai imam dalam kekuasaan kepemimpinan umum begitu juga eksistensinya<sup>4</sup>.

Dalam fiqih siyasah islam, sebagai mana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW yaitu membentuk institusi esksekutif dan administrative untuk melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang kepala Negara<sup>5</sup>.

Melihat hal itu, para ulama fiqih telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqih islam

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 178.

mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan akibat hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma politik Islam yang bersifat khusus, yaitu elastis. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqh dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara<sup>6</sup>.

Dari uraian di atas dapat diketahui Islam tidak mengatur dan menentukan secara eksplisit tentang bentuk pemerintahan suatu Negara, daerah, atau wilayah. Tetapi Islam hanya memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu Negara, hanya mempunyai suatu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat/masyarakat.

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Pelaksanaan otonomi daerah pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara pada hal-hal tertentu seperti; dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, berdasarkan angket yang didapati bahwa pelaksanaan otonomi daerah tersebut sudah disalurkan dengan cukup baik kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Ini berarti bahwa dalam

---

<sup>6</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam (Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayatud Diniyyah)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 67

menjalankan sistem pemerintahannya, Kepala Desa beserta perangkatnya sudah berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam.

Di antara tugas dan kewajiban pemerintah Desa Sungai Tonang kecamatan kampar utara juga harus bisa menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

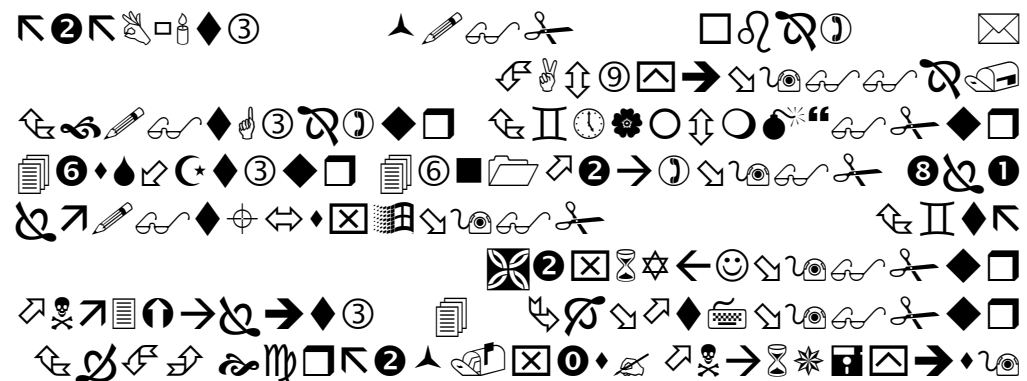
Sedangkan dalam Fiqih Siyasah, tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparatnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Sungai Tonang.

Dalam masalah peningkatan ekonomi masyarakat, di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara sudah dilaksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terbukti dengan adanya berbagai macam fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintahan Desa Sungai Tonang seperti bibit unggul pertanian dan kerambah beserta bibit ikannya. Hanya saja perlu adanya kejelasan dan sikap transparan dalam kepengurusan dan manajemen pelaksanaan program-program yang telah dilakukan. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak menimbulkan berbagai macam persepsi yang negatif dari masyarakat.

Dalam menjalankan pemerintahan, aparat Desa Sungai Tonang harus mempunyai kekuatan dan kharisma serta berwibawa. Membela yang lemah kemudian berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat, dan mempunyai tugas serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan

yang bathil,serta istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan adanya unsur-unsur dan sifat-sifat tersebut maka dalam melaksanakan pemerintahannya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat.

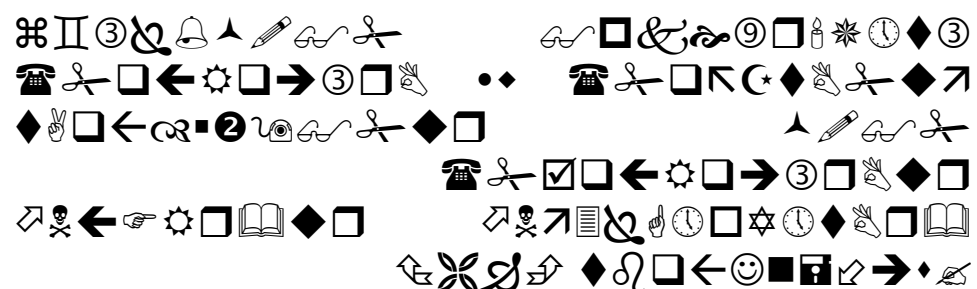
Firman Allah dalam surat An-Nahal ayat 90



Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji,kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu, agar dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. An-Nahal: 90 ).

Firman Allah dalam Surat Al- Anfal (8): 27)



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul ( Muhammad) dan juga janganlah kamu



*mengkhiananti amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,  
sedang kamu mengetahui”*. (Al-Anfal : 27)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari semua pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan Desa Sungai Tonang secara umum sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerjasama antara aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur. Hanya dari aspek transparansi dalam penyaluran berbagai bantuan untuk masyarakat desa kurang baik.

1. Badan Perwakilan Desa telah dapat melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan desa sungai tonang. Hal ini juga dapat dilihat dari aspek keaktifan anggota, peran pengawasan pemerintahan desa, keikutsertaan dalam pembahasan pembangunan desa. Hanya saja dalam peran pengawasan tentang penggunaan APBDes kurang baik terutama dalam hal penyaluran bantuan oleh pemerintah desa.
2. Pelaksanaan pemerintahan pada Desa Sungai Tonang belum berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyash Islam. Hal ini terlihat dari penyaluran bantuan dari pemerintah pusat belum disalurkan dengan secara transparan kepada masyarakat.

**B. Saran**

1. Sebaiknya aparatur pemerintahan desa sungai tonag harus lebih transparan dalam penyaluran berbagai bantuan untuk masyarakat desa .
2. Seharusnya Badan Perwakilan Desa lebih meningkatkan peran pengawasan terhadap penggunaan APBDes terutama dalam hal penyaluran bantuan oleh pemerintah desa.
3. Seharusnya perangkat pemerintahan pada Desa Sungai Tonang dalam menyelenggarakan pemerintahan otonomi harus berasaskan atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Ateng Syafrudin, *Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Cipta Media, 2006.
- C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia; Hukum Adminitarasi Daerah*, Jakarta: Sinar Garfika, 2004, Cet. ke-2.
- Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007,
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Cet. ke-2.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otnomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Cet. ke-4.
- Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam* ( Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayaind Dinnyyah), Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, Cet. ke-4.

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Jimly Asshiddigie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2001.

Musda Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Cet. ke-2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

## DAFTAR TABEL

Halaman

1. Tabel II.1: Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	14
2. Tabel II.2: Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	15
3. Tabel II.3: Jumlah Sarana Ibadah.....	16
4. Tabel II.4: Jumlah Sarana Pendidikan .....	17
5. Tabel IV.I: Komunikasi Internal Perangkat Desa pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang .....	44
6. Tabel IV.2: Pelaksanaan Administrasi Otonomi Desa pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang .....	45
7. Tabel IV.3: Transparansi pengelolaan keuangan Desa Sungai Tonang.....	46
8. Tabel IV.4: Kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakat .....	46
9. Tabel IV.5: Kemampuan Kepala Desa dalam Menjalankan Pemerintahan	47
10. Tabel IV.6: Penyaluran Bantuan untuk Masyarakat .....	48
11. Tabel IV.7: Keaktifan Anggota BPD dalam Menjalankan Tugasnya.....	52
12. Tabel IV.8: Pemantauan Anggota BPD Terhadap Kegiatan Aparatur Desa	52
13. Tabel IV.9: Keikutsertaan Anggota BPD dalam Memenuhi undangan Aparatur Desa.....	53
14. Tabel IV.10: Pengawasan Anggota BPD Terhadap Penggunaan APBDes	54

## **DAFTAR ANGKET**

### **A. Ketentuan Angket :**

- Angket ini hanya bertujuan semata-mata untuk penelitian ilmiah.
  - Pengisian angket ini tidak ada hubungannya dengan studi dan pekerjaan anda.
  - Pengisian secara jujur sangat diharapkan menurut keadaan yang sebenarnya.
  - Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat dari beberapa jawaban yang disediakan dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B dan C dan seterusnya.
  - Atas bantuannya dalam mengisi angket ini penulis ucapkan terima kasih.
- 

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Menurut saudara bagaimana komunikasi internal perangkat desa pada pemerintahan desa sungai tonang kecamatan kampar utara?
  - a. Baik
  - b. Cukup
  - c. Kurang
2. Bagaimana menurut saudara pelaksanaan administrasi otonomi desa di desa sungai tonang kecamatan kampar utara?
  - a. Baik
  - b. Cukup
  - c. Kurang
3. Bagaimana menurut saudara transparansi pengelolaan keuangan desa di desa sungai tonang kecamatan kampar utara?
  - a. Baik
  - b. Cukup
  - c. Kurang

4. Menurut saudara, apakah kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat di desa sungai tonang kecamatan kampar utara sudah berjalan dengan;
  - a. Baik
  - b. Cukup
  - c. Kurang
5. Bagaimana menurut saudara kemampuan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa sungai tonang kecamatan kampar utara?
  - a. Baik
  - b. Cukup
  - c. Kurang
6. menurut saudara berbagai jenis bantuan untuk masyarakat melalui pemerintah desa telah di salurkan kepada masyarakat dengan;
  - a. Baik
  - b. Cukup
  - c. Kurang
7. Anggota BPD selalu aktif melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, bagai mana menurut pendapat saudara
  - a. Setuju
  - b. Kurang Setuju
  - c. Tidak Setuju
8. Anggota BPD selalu memantau kegiatan aparatur desa, bagaimana menurut pendapat saudara?
  - a. Setuju
  - b. Kurang Setuju
  - c. Tidak Setuju



9. Anggota BPD selalu Ikutserta dalam memenuhi undangan Aparatur Desa dalam membahas berbagai kegiatan di Desa, bagaimana menurut pendapat saudara?
- a. Setuju
  - b. Kurang Setuju
  - c. Tidak Setuju
10. Anggota BPD selalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBDes, bagaimana menurut pendapat saudara?
- a. Setuju
  - b. Kurang Setuju
  - c. Tidak Setuju

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana bentuk komunikasi internal yang dilakukan para aparatur desa dalam menjalankan tugas-tugasnya?
2. Apa yang telah dilakukan oleh aparatur desa dalam hal transparansi pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah aparatur desa bekerjasama dalam suatu hal tentang penyelenggaraan pembangunan desa dengan masyarakat?
4. Apa upaya yang dilakukan aparatur desa jika ada penyaluran bantuan kepada masyarakat Desa Sungai Tonang?
5. Bagaimana pengawasan BPD dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Sungai Tonang?
6. Apakah anggota BPD melakukan pengawasan terhadap APBDes?

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Robin Darmendra, demikian nama lengkap penulis. Lahir di Bangkinang pada tanggal 25 Februari 1988. penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ayah bernama Syarbaini dan ibu bernama Rosidah. Saat ini penulis tinggal di rumah orang tua di Bangkinang, Kabupaten Kampar – Riau.

Penulis mendapatkan pendidikan formal pertama kali di SDN 016 Sungai Tonang. Kemudian melanjutkan ke SMPN 06 Kampar. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke SMA Muhammadiyah Pekanbaru. Kemudian tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA-RIAU). Dan dengan izin Allah SWT akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi srata 1 (S1) dengan judul skripsi “Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Tinjauan Fiqih Siyasah” dan dinyatakan lulus pada tanggal 08 November 2010 dengan menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I).